

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari suatu model pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah berupaya menciptakan perubahan terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kepada kondisi yang lebih baik. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dengan merencanakan program pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diukur dengan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat terhadap faktor produksi. Namun selama pemerintah menerapkan model pembangunan yang berorientasi pada produksi, ternyata menimbulkan segala problematik bagi kalangan masyarakat. Model pembangunan berorientasi pada produksi memperlihatkan kebutuhan produksi lebih penting daripada kebutuhan rakyat. Seiring dengan berkembangnya model pembangunan yang berorientasi pada produksi, maka berkembang model pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Pembangunan seharusnya mengutamakan rakyat sebagai kunci dari proses pembangunan. Hakikat dari pembangunan berlandaskan rakyat dilakukan dengan cara-cara yang adil, meningkatkan keterpaduan sosial dan politik berdasarkan hak azasi, non-diskriminasi serta memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang. Tujuan pembangunan berlandaskan rakyat untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat berdasarkan aspirasi-aspirasi kolektif. Tidak hanya itu, Tujuan objektif pembangunan berlandaskan kepada rakyat pada dasarnya untuk memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan distributif dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata (Handini, 2019:21).

Konsep pembangunan kepada rakyat diperjelas oleh Todaro (dalam Hajar, 2018:7) yang menyatakan pembangunan merupakan proses keseluruhan perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini membuktikan

bahwa pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan pendapatan, tetapi harus memperhatikan aspek kemanusiaan seperti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan untuk menjadi orang yang memiliki harga diri dan bernilai) serta kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup yang tidak merugikan orang lain. Maka, konsep pembangunan merupakan suatu konsep normatif dan proses multidimensional.

Pembangunan berlandaskan kepada rakyat tentunya dilaksanakan melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan akibat dari ketidakberhasilan (Friedmann, 1992 dalam Putra, 2006). Ketidakberhasilan yang dituju berupa aplikatif dari model pembangunan produksi dalam memberantas masalah kemiskinan. Shardlow (dalam Adi, 2008:77) menggambarkan pemberdayaan bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas dapat mengatur kehidupan mereka sendiri untuk membentuk kehidupan mereka sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada dasarnya mendorong objek sasaran untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dikerjakan. Dengan begitu, objek sasaran memiliki kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya. Berdasarkan uraian diatas memperlihatkan bahwa konsep pemberdayaan memiliki interpretasi ganda.

Memahami lebih lanjut pemberdayaan perlu digambarkan model pemberdayaan yang ada di Indonesia. Zubaedi (2013:120) ada dua model pengembangan masyarakat yaitu model *social action* dan model *sustainable*. Model *social action* menekankan pada gerakan LSM yang mengutamakan pengembangan kualitas modal sosial, seperti kepatuhan pada sistem norma, tata nilai, sikap, keyakinan, budaya bernegara, saling percaya, solidaritas dalam bekerjasama, perilaku dalam bekerjasama, peran dan aturan main, jaringan kerja, hubungan interpersonal, tata cara dan keteladanan, organisasi sosial, keterkaitan horizontal dan vertikal. Model *sustainable* menekankan pada kegiatan LSM dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kesinambungan yang menekankan pada aspek intervensi modal sosial, modal manusia, modal fisik dan modal alamiah secara sinergis dan berimbang. Sedangkan menurut Yunus (2017:109) model pemberdayaan masyarakat yaitu model integrasi. Model integrasi yang

dimaksud berupa sinergisitas antar satuan kerja pemerintah dan pihak swasta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa tanaman sawit dan sapi. Pelaksanaan model integrasi sawit dan sapi dalam pemberdayaan masyarakat di Aceh Timur dilakukan dengan dua cara. Langkah pertama pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan atas inisiatif petani sendiri. Langkah kedua pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan atas bantuan pemerintah, artinya ada pemilik sawit yang mendapat sapi dari pemerintah.

Tidak hanya itu, Jack Rothman seorang sosiolog dan pekerja sosial Amerika juga memberikan gambaran teoritis tentang tiga model pemberdayaan yang diutarakannya. Penelitian Rothman berpusat pada komunitas dan analisis organisasi, termasuk merancang perubahan dalam komunitas dan institusi sosial. Salah satu karyanya yang diakui secara nasional dan internasional adalah "Tiga Model Praktek Organisasi Masyarakat," sebuah konseptualisasi terkemuka intervensi masyarakat. Formulasi ini ditetapkan sebagai "teks klasik" oleh *Journal of Community Development*. Rothman (dalam Adi, 2008:120) menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui beberapa intervensi komunitas, seperti pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi social. Masing-masing model memiliki indikator-indikator yang berbeda satu sama lain.

Model pengembangan masyarakat lokal tentang indikator tujuan tindakan terhadap masyarakat lebih kepada proses. Indikator asumsi mengenai struktur dan keadaan permasalahan komunitas dimana komunitas berbentuk tradisional dengan kesenjangan relasi dalam memecahkan masalah dengan cara demokratis. Indikator strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dengan keterlibatan seluruh masyarakat. Indikator taktik dan teknik pemberdayaan dengan konsensus. Indikator peran praktisi sebagai *enabler*. Indikator media pemberdayaan dengan menciptakan dan manipulasi kelompok kecil yang berorientasi tugas. Indikator pandangan terhadap susunan kewenangan dimana masyarakat sebagai bagian sistem klien dan kolaborator. Indikator batasan definisi penerima layanan dimana keseluruhan masyarakat yang terdapat dalam wilayah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Indikator asumsi kepentingan-kepentingan komunitas merupakan

pemufakatan dari berbagai kepentingan kelompok. Indikator konsepsi penerima layanan dimana masyarakat merupakan klien yang berharga. Indikator konsepsi peran penerima layanan dimana masyarakat merupakan komunitas yang berperan aktif untuk mengembangkan diri mereka. Indikator pemanfaatan pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai alat untuk mengambil keputusan secara bersama.

Model perencanaan sosial pada indikator tujuan tindakan terhadap masyarakat lebih kepada tugas. Indikator asumsi mengenai struktur dan keadaan permasalahan komunitas dimana merupakan masalah sosial yang sedang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Indikator strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mencari bukti-bukti atau data-data yang ada di lapangan terkait dengan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Indikator taktik dan teknik pemberdayaan dengan konsensus maupun konflik. Indikator peran praktisi sebagai pakar. Indikator media pemberdayaan masyarakat dimana seorang perencana sosial harus mampu mendiagnosa komunitas, mendapatkan data tentang komunitas, dapat memberikan saran terhadap metode penyelesaian masalah yang dihadapi oleh komunitas, dan mempunyai kemampuan mengevaluasi. Indikator orientasi terhadap struktur kekuasaan dimana masyarakat sebagai sponsor praktisi. Indikator batasan definisi penerima layanan dimana keseluruhan masyarakat yang terdapat dalam wilayah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan maupun untuk wilayah lainnya yang memiliki fungsional dengan wilayah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Indikator asumsi kepentingan-kepentingan komunitas merupakan pemufakatan maupun konflik. Indikator konsepsi penerima layanan dimana masyarakat merupakan konsumen yang menerima kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Indikator konsepsi peran penerima layanan dimana masyarakat menerima kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Indikator pemanfaatan pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai alat untuk menggali apa yang diperlukan komunitas.

Model aksi sosial pada indikator tujuan tindakan terhadap masyarakat lebih kepada tugas maupun proses. Indikator asumsi mengenai struktur dan keadaan permasalahan komunitas dimana komunitas hirarki dari *privilege* dan kekuasaan. Artinya disini adanya posisi yang berbeda antara pihak yang memberikan pemberdayaan dengan masyarakat yang menerima kegiatan pemberdayaan tersebut. Indikator strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dengan membumihkan isu-isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Indikator taktik dan teknik pemberdayaan dengan konflik. Indikator peran praktisi sebagai advokat dan aktivis. Indikator media pemberdayaan masyarakat dimana seorang advokat memanipulasi pengorganisasian dan pergerakan masyarakat mempengaruhi proses politik. Indikator orientasi terhadap struktur kekuasaan dimana masyarakat sebagai bagian eksternal dari pihak yang memberikan pemberdayaan. Indikator batasan definisi penerima layanan dimana pihak yang diberdayakan merupakan segmen masyarakat yang membutuhkan bantuan. Indikator asumsi kepentingan-kepentingan komunitas merupakan pertentangan kepentingan sehingga susah didapatkan kata bersama. Indikator penerima layanan dimana masyarakat merupakan korban. Indikator konsepsi peran penerima layanan dimana masyarakat merupakan *employee*. Indikator pemanfaatan pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai alat untuk mencapai kekuasaan objektif bagi masyarakat yang diberdayakan.

Penjabaran model-model pemberdayaan yang telah penulis uraikan sebelumnya pada penelitian menggunakan tiga model pemberdayaan Jack Rothman. Pemilihan penggunaan tiga model Jack Rothman dipilih oleh penulis karena Rothman menggambarkan secara kompleks model pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan model pemberdayaan lainnya yang telah penulis utarakan. Sehingga menjadi dasar bagi penulis untuk menggunakan model pemberdayaan masyarakat Jack Rothman pada penelitian.

Implementasi kegiatan pemberdayaan memerlukan sejumlah bantuan pihak yang berkepentingan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pihak yang dimaksudkan tersebut salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Istilah LSM pertama kali diterapkan dalam lokakarya kerjasama terpadu

pengembangan pedesaan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bina Desa pada tanggal 13-15 April 1978 di Ungaran, Jawa Tengah. Istilah Lembaga Pembinaan Sosial Masyarakat (LPSM) atas usul Dr. Ki Sariano Mangunpranoto diusulkan sebagai pengganti istilah *Non-Governmental Organization* (NGO) di Indonesia. Kemudian, pada seminar nasional yang diselenggarakan melalui kerjasama Sekretariat Bina Desa Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tahun 1981 istilah LSM disepakati mengganti istilah Ornop. Perdebatan istilah tersebut diakibatkan oleh kondisi politik waktu itu. Meskipun mereda setelah Indonesia masuk ke era baru dan era reformasi. Namun, sebagian masih menyebut LSM, sebahagian lagi menyebutkan Ornop atau tetap dengan istilah aslinya (Putra, 2006).

Istilah LSM digunakan sebagai suatu organisasi yang bergerak di luar pemerintahan, bersifat otonom dan mandiri dari pemerintah. Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, dimana LSM adalah organisasi lembaga yang anggotanya adalah warga negara republik Indonesia yang secara sukarela bergerak di bidang kegiatan tertentu, yang ditetapkan oleh organisasi lembaga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Selain itu, Tim Fasilitasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) untuk Kode Etik menyebutkan LSM merupakan beberapa bentuk kelompok atau organisasi dalam masyarakat yang secara hukum bukan merupakan bagian dari pemerintah, bekerja tidak mencari keuntungan serta melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya.

Dari uraian di atas, memperlihatkan karakteristik LSM. Pertama, karakteristik LSM adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha mencapai masyarakat yang sejahtera seringkali diakibatkan oleh berbagai benturan kepentingan, baik kepentingan penguasa dengan masyarakat, maupun kepentingan pelaku ekonomi di sektor swasta dengan masyarakat. Pertentangan kepentingan tersebut dimenangkan oleh kepentingan jangka pendek dari agenda politik sang penguasa atau terpinggirkan oleh keserakahan para pelaku ekonomi

di sektor swasta. Tentunya hal ini berdampak kepada masyarakat. Secara politik masyarakat teralienasi dari proses pembuatan kebijakan. Secara ekonomi kebijakan yang ditetapkan hanya menguntungkan kelompok kecil saja. Secara sosial dan budaya, akibat tidak meratanya distribusi pembangunan mengakibatkan adanya kesenjangan sosial baik secara vertikal maupun horizontal yang sangat tajam.

Kedua, karakteristik LSM yaitu kesukarelaan atau mandiri. Kesukarelaan atau mandiri suatu LSM diidentifikasi sebagai lembaga nirlaba. Nirlaba berarti program yang dilaksanakan oleh LSM bukan mencari keuntungan keuangan. Ketiga, karakteristik LSM yaitu berswadaya dan otonom dari pemerintah. Berswadaya dan otonom dari pemerintah dimana LSM dalam membiayai program-programnya dengan upaya dan kekuatan yang dimiliki. LSM menggerakkan seluruh modal sosial yang tersedia pada lingkungan masyarakat. LSM dalam pergerakannya pada saat ini dipengaruhi oleh dukungan dari donor-donor internasional atau *funding agency*.

LSM yang berkembang pada saat ini cukup banyak di berbagai wilayah Indonesia sebanyak 390.293 organisasi, termasuk di dalamnya LSM-LSM yang ada di Kota Padang dengan jumlah sekitar 61 LSM (<https://klikpositif.com/inilah-61-lsm-yang-terdaftar-di-kesbangpol-dan-linmas-kota-padang/>). Keberadaan LSM-LSM Sumatera Barat banyak memiliki kantor di Kota Padang. Namun mengingat ruang lingkup yang terlalu luas dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penulis, maka ditetapkan tiga LSM saja yaitu LSM Jaringan Kerja Pengembang Partisipasi Indonesia (Jemari) Sakato, LSM Lembaga Pengkajian dan pemberdayaan Masyarakat (LP2M) dan LSM Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM-M). Kemudian dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti kemudahan akses bagi penulis dalam melakukan penelitian meskipun masih dalam kondisi covid-19 secara langsung. Selain itu, juga didorong oleh kedekatan penulis dengan beberapa pihak-pihak yang ada di ketiga LSM tersebut memberi ruang gerak yang cukup luas bagi penulis untuk dapat menggali atau mendapatkan data-data informasi yang diperlukan. Tidak hanya itu, ketiga LSM tersebut dapat

dikatakan merupakan LSM yang aktif sehingga dapat mewakili pergerakan masing-masing LSM.

LSM Jemari Sakato didirikan oleh beberapa pemerhati partisipasi, pengembang dan pegiat partisipasi baik perorangan, lembaga maupun jaringan kerja pada tanggal 14 Juli 2004 di Sumatera Barat. Sejarah pendirian lembaga ditandai dengan adanya deklarasi pendirian oleh para pegiat partisipasi di Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Deklarasi ini menandakan dimulainya gerakan pengembangan partisipasi oleh Jemari Sakato dengan harapan dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat yang lebih baik (*for better society*).

Jemari Sakato menggunakan metode dan fasilitasi dialog multipihak untuk perluasan partisipasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Jemari Sakato menggunakan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, akuntabel dan transparan, pengembangan jejaring dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jemari Sakato mengembangkan nilai organisasi belajar yaitu *shared vision*, *team learning*, mental model, dan *personal mastery and system thinking*. Jemari Sakato juga mengembangkan empat kompetensi untuk menjalankan roda pergerakan LSM. Keempat kompetensi yang dimaksud antara lain riset aksi dan fasilitasi menuju tata pemerintahan yang lebih baik (termasuk advokasi perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi), advokasi kebijakan dan anggaran yang berkeadilan, monitoring dan evaluasi program atau kebijakan bagi perbaikan pelayanan publik, dan pengembangan metodologi fasilitasi yang efektif, interaktif dan partisipatif. Adapun program-program yang sudah dijalankan oleh LSM Jemari Sakato antara lain tahun 2004-2009 fokus pada perbaikan tata kelola lembaga dan kegiatannya fokus pada riset dan monitoring pelayanan, tahun 2009-2014 telah mulai memasukan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, pembangunan inklusif dan adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana strategis sehingga beberapa kegiatan juga menyesuaikan, dan tahun 2014-2019 fokus pada perluasan partisipasi, dan kemudian terus melakukan advokasi berbasis bukti pada level desa, kabupaten atau kota dan provinsi (<https://www.jemarisakato.org/profil-jemari-sakato>).

LSM LP2M lahir pada tanggal 7 September 1995. Kelahiran LSM LP2M menjadi tanda bangkitnya gerakan perempuan di Sumatera Barat. Kelahiran LP2M akibat adanya kesadaran kritis dari berbagai kontradiksi antara realitas perempuan yang subordinat dari nilai dan falsafah budaya. LSM LP2M dalam menjalankan berbagai kegiatan dan kerjasama dengan pihak lain memiliki empat kompetensi meliputi penguatan ekonomi perempuan, partisipasi dan representasi politik perempuan, advokasi hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan serta pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Adapun program-program yang telah dijalankan antara lain program kerjasama dengan ASPPUK (1995-sekarang), program kerjasama dengan Yayasan Pemulihan Keberdayaan Masyarakat-YPKM (1999-2000), kerjasama dengan *Heifer Project International* (2001-2005), kerjasama dengan *Project Concern International* (PCI) (2001-2004), kerjasama dengan Siemenpu (2005-2006), kerjasama dengan *Environmental Service Program*, ESP-USAID (2006-2007), kerjasama dengan *Global Found For Women* (Juli 2009-Juni 2010), kerjasama dengan UNDP (Agustus 2011-Januari 2012), kerjasama dengan *Global Found for Women* (November 2013-Juni 2014), kerjasama dengan *Global Found for Woman* (2015), Kerjasama dengan Konsorsium Perempuan Sumatera MAMPU (PERMAMPU)-DFAT Australia (Januari 2015-Desember 2019), pemberdayaan ekonomi perempuan ala LP2M (2020), 20 petani muda dan perempuan di Padang Pariaman belajar pertanian organik (2021) dan sebagainya (<https://lp2m.or.id/>).

LSM YCM-M lahir pada tanggal 17 Juli 1995. Kelahiran LSM YCM-M pada awalnya merupakan kumpulan individu-individu yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, budaya, pendidikan, pengalaman dan keahlian yang berbeda, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan yang sama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat Mentawai. Kegiatan-kegiatan advokasi yang dilakukan meliputi advokasi sumber daya alam, pembuatan dan perumusan kebijakan-kebijakan publik, advokasi anggaran dan kasus-kasus korupsi dan layanan-layanan dasar dari negara seperti kesehatan dan pendidikan bertujuan memperkuat posisi masyarakat adat Mentawai agar dapat mempertahankan sumber daya alam yang dimilikinya.

Adapun program-program yang telah dijalankan LSM YCM-M antara lain pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui pengelolaan wilayah adat atau hutan adat (menginisiasi dan fasilitasi Perda Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Mentawai (PPUMHA), memfasilitasi terbitnya sembilan SK pengakuan dan perlindungan uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Mentawai untuk sembilan suku di Mentawai hingga akhir 2020, kebijakan dan advokasi (YCM-M berhasil mendorong pemberlakuan Undang-Undang Anti Korupsi terhadap pelaku *illegal logging* bersama dengan NGO di Sumatera Barat) informasi, media dan komunikasi (menerbitkan koran pertama untuk masyarakat Mentawai pada 2001-2019 bernama *puailiggoubat* sebagai media informasi dan publikasi masyarakat Mentawai), pendidikan dan pengelolaan pengetahuan (mendirikan lima sekolah alternatif berbasis budaya pada komunitas adat Mentawai, menerbitkan sejumlah buku terkait budaya dan pengetahuan lokal masyarakat adat Mentawai) (<https://www.ycmmmentawai.org/>). Berdasarkan uraian sebelumnya, menimbulkan keinginan penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berswadaya. Mewujudkan kondisi masyarakat yang demikian perlunya semacam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya untuk sementara, tetapi dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Memahami hal demikian tentunya perlu digambarkan model atau bentuk kegiatan pemberdayaan yang telah dijalankan oleh LSM. Berdasarkan hal demikian maka rumusan masalah penelitian berupa pertanyaan :

1. Model pemberdayaan seperti apa yang dipilih oleh LSM di Sumatera Barat dalam menjalankan program kegiatan LSM ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LSM di Sumatera Barat berdasarkan model pemberdayaan yang dipilih oleh LSM ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Secara Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan mengkaji penerapan model Rothman dalam pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh ketiga LSM di Sumatera Barat.

2. Secara Khusus

- a. Menganalisis penerapan tiga model pemberdayaan Rothman terhadap program pemberdayaan yang dominan dilakukan oleh ketiga LSM di Sumatera Barat.
- b. Menjelaskan hambatan LSM di Sumatera Barat dalam penerapan tiga model pemberdayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pengembangan keilmuan (akademik)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu sosiologi, terutama mata kuliah Strategi dan Metode Pemberdayaan Masyarakat.

2. Bagi kepentingan praktis

- a. Bagi NGO atau LSM dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat umum, dapat menambah sumber referensi atau memperkaya wawasan ilmu pengetahuan yang sudah ada.

